

## **ABSTRAK**

HELDI LAJAMBU. 271 409 119.Skripsi.” Analisis Hukum Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah Di Kota Gorontalo”. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I : Ibu Hj. Mutia Cherawaty Talib, SH. MH. Pembimbing II Ismail Tomu, SH. MH.

Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena hibah di Kota Gorontalo belumlah cukup baik. Berdasarkan isi pasal 37 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, jelas bahwa perolehan tanah secara hibah seyogyanya didaftarkan peralihan haknya itu di kantor pertanahan setempat sebagai bentuk pengamanan hibah tanah namun pada kenyataannya ketidak cermatan Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat yang berasal dari hibah palsu seringkali terjadi karena tidak meneliti apakah hibah betul-betul dibuat oleh PPAT atau tidak. Akibatnya sengketa tanah dengan sertifikat berasal dari hibah palsu bermunculan.

Proses pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena hibah di kota Gorontalo sudah sesuai dengan SPOP tetapi masih terjadi beberapa kasus mengenai hibah yakni terdapat 5 kasus dalam kurun 2 tahun saja. 2) Beberapa Faktor yang menjadi hambatan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena hibah datang dari PPAT yakni menunda proses peralihan karena harus menunggu SPPT dari Kantor PBB, BPN yakni Proses pelaksanaan dan pemberian informasi yang berbelit-belit dan dari masyarakat yakni belum mengerti tentang proses pendaftaran peralihan hak itu sendiri maupun anggapan bahwa pendaftaran peralihan hak atas tanah yang mahal biayanya.

Kata kunci: **Pendaftaran, Peralihan Hak Atas Tanah, Hibah,**

## **ABSTRACT**

HELDI LAJAMBU. 271 409 119. Skripsi. "Analysis of Transitional Laws Against Registration of Ownership Rights to Land For Grants In Gorontalo city". Department of Law, Faculty of Social Sciences, State University of Gorontalo. Supervisor I: Mrs. Hj. Mutia Cherawaty Talib, SH. MH. Supervisor II Ismail Tomu, SH. MH.

The registration of the transfer of rights to land as a grant in Gorontalo city is not yet good enough. Based on the contents of Article 37 paragraph 1 of Regulation No. 24 of 1997 on land registration, it is clear that the land acquisition grant the right transition should be registered in the local land office as a means of securing a grant of land but in reality lack cermatan Land Office to issue certificates grant comes from the false is often occur because not examine whether the correct grant -betul made by PPAT or not. As a result of land disputes with the fake certificate from grants to emerge.

Implementation of transitional registration of land rights for grants in Gorontalo city is in conformity with the SPOP but it still happens some cases the grants that there were 5 cases in the next 2 years. 2) Some of the factors which become obstacles in the registration of transfer of land rights for the grant comes from the PPAT delay the transition process because they have to wait SPPT of the United Nations Office, the BPN implementation process and providing information convoluted and of society that is not understood about the registration process transfer of rights itself and the assumption that the registration of transfer of rights over land is expensive.

**Keywords:** Registration, Transfer of Rights to Land, Grant,

